

KONTRIBUSI AGROFORESTRI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT PENGELOLA HUTAN KEMASYARAKATAN DI SESAOT LOMBOK

Noviana Khususiyah¹ dan Suyanto¹

¹World Agroforestry Centre (ICRAF), PO Box 16, Bogor 16001, Indonesia

E-mail address: n.khususiyah@cgiar.org

ABSTRAK

Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki jumlah penduduk sekitar 4,36 juta jiwa pada tahun 2008, dan 23,81% diantaranya tergolong masyarakat miskin. Persentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Indonesia yaitu sekitar 15,42%. Tingginya angka kemiskinan dan keterbatasan lahan pertanian, maka masyarakat pedesaan yang hidup di sekitar hutan pada umumnya memanfaatkan lahan hutan sebagai salah satu sumber mata pencahariannya. Pengelolaan Hutan Lindung Sesaot oleh masyarakat di sekitarnya sebagai sumber mata pencaharian telah berlangsung sejak tahun 1970an. Dari tahun 1995 hingga sekarang, 6.000 kepala keluarga atau 18.000 jiwa di kawasan hutan lindung Sesaot menggantungkan sumber kehidupannya dari pengelolaan kawasan hutan. Survei terhadap 110 rumah tangga yang terdiri dari 40 rumah tangga yang memiliki ijin hak pengelolaan hutan (HKm), 40 rumah tangga yang belum mendapat ijin HKm dan 30 rumah tangga bukan pengelola lahan hutan (non HKm) yang dipilih secara acak (*random sampling*) dilakukan di kawasan hutan Sesaot. Proporsi pendapatan dari hasil kebun agroforestri dari kawasan hutan pada petani yang belum mendapat ijin HKm mencapai 59% dari total pendapatan, pada petani yang telah mendapat ijin HKm mencapai 33%, sedangkan pada petani non HKm, proporsi pendapatan terbesar berasal dari kebun agroforestri di lahan pribadi yaitu sebesar 38%. Pendapatan dari kebun agroforestri di kawasan hutan yang dikelola masyarakat terbukti meningkatkan pemerataan pendapatan, baik bagi petani yang telah mendapat ijin HKm maupun petani yang belum mendapat ijin HKm yang ditunjukkan oleh nilai koefisien konsentrasi 0,9 (kurang dari satu).

Kata kunci: agroforestri, pendapatan rumah tangga, pemerataan pendapatan dan Hutan Kemasyarakatan

I. PENDAHULUAN

Propinsi NTB memiliki jumlah penduduk sekitar 4,36 juta jiwa pada tahun 2008, dan 23,81% diantaranya tergolong masyarakat miskin. Persentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Indonesia yaitu sekitar 15,42% (BPS). Dengan tingginya angka kemiskinan dan keterbatasan lahan pertanian, maka masyarakat pedesaan yang hidup di sekitar hutan pada umumnya memanfaatkan lahan hutan sebagai salah satu sumber mata pencahariannya.

Pengelolaan Hutan Lindung Sesaot oleh masyarakat di sekitarnya sebagai sumber mata pencaharian sesungguhnya telah berlangsung cukup lama. Sejak tahun 1995 hingga sekarang, 6.000 KK atau 18.000 jiwa di kawasan Sesaot menggantungkan sumber kehidupannya dari pengelolaan kawasan tersebut. Kawasan seluas 5.950,18 hektar ini merupakan kawasan hutan yang sangat strategis, sebab wilayah ini merupakan daerah tangkapan air yang memasok kebutuhan air bagi masyarakat wilayah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah, baik untuk kebutuhan air minum melalui PDAM Menang Mataram maupun untuk pemenuhan kebutuhan air bagi irigasi pertanian.

Pengelolaan lahan di kawasan Sesaot ini pada umumnya berupa kebun campuran (agroforestri). Keputusan petani untuk menanam dengan pola agroforestri kompleks, yaitu agroforestri berbasis buah-buahan/kayu-kayuan atau agroforestri sederhana yang berupa agroforestri berbasis kakao atau kopi, tergantung pada tujuan petani. Secara umum, petani berlahan sempit cenderung memilih berinvestasi dengan resiko rendah, yaitu menerapkan pola agroforestri kompleks. Apabila salah satu jenis tanaman mengalami gagal panen, masih ada harapan pada jenis tanaman lainnya (Khususiyah *et al.* 2014).

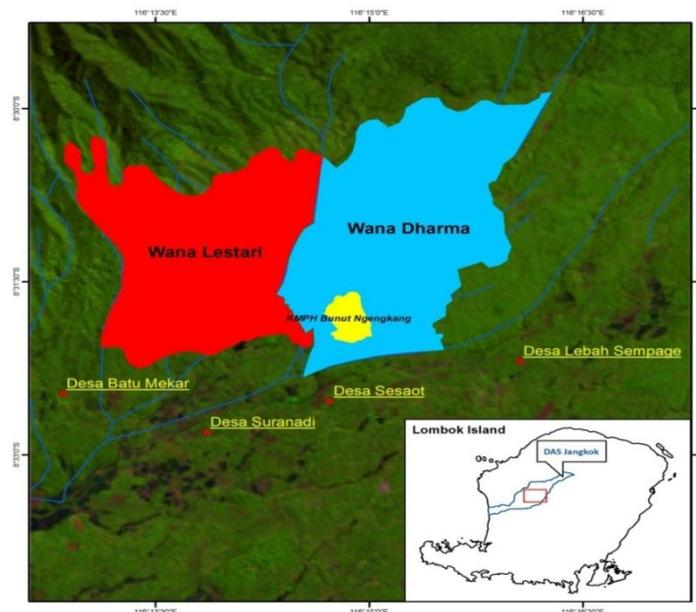
Agroforestri yang secara umum dikenal sebagai kebun campur dengan komponen tanaman tahunan dan semusim merupakan suatu pengelolaan lahan yang dapat ditawarkan sebagai suatu strategi alternatif mata pencaharian bagi masyarakat miskin yang memiliki lahan dan modal terbatas, tetapi dapat meningkatkan mata pencaharian dan manfaat lingkungan secara berkelanjutan. Sebagai contoh, 'agroforestry' kopi yang diterapkan oleh para petani kecil di Lampung, Sumatera dapat menyediakan jasa lingkungan dan secara bersamaan meningkatkan kesejahteraan petani (Van Noordwijk *et al.* 2004).

Dalam studi ini, pengelolaan lahan di kawasan Sesaot dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu kelompok yang telah mendapatkan ijin HKm (HKM ijin), kelompok yang belum mendapatkan ijin HKm (HKm non ijin) dan kelompok yang mengelola lahan pribadi/milik (Non HKm).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di sekitar kawasan Sesaot Lombok Barat, sekitar 5950.18 ha yang dikelola oleh dua kelompok, yaitu Wana Darma dan Wana Lestari (gambar 1). Kedua kelompok tani tersebut, sekarang sedang dalam proses untuk mendapatkan ijin pengelolaan HKm. Sebagian dari lokasi Wana Darma terdapat kelompok Masyarakat Pengelola Hutan Bunut Ngenggang (KMPH), yaitu seluas 21 ha. Kelompok KMPH ini sudah mendapatkan ijin pengelolaan HKm sejak tahun 2008 dari Pemerintah kabupaten Lombok Barat.

Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan, wawancara dengan panduan kuisisioner dan studi pustaka. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja, yaitu di DAS Sesaot. Pengambilan sampel rumah tangga dilakukan secara acak (*random sampling*) dilakukan di kawasan Sesaot dengan menggunakan panduan kuisisioner. Survei terhadap 110 rumah tangga yang terdiri dari 40 rumah tangga yang memiliki ijin hak pengelolaan hutan (HKm), 40 rumah tangga yang belum mendapat ijin HKm (HKm non ijin) dan 30 rumah tangga bukan pengelola lahan hutan (non HKm). Survey dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kepemilikan lahan, jenis tanaman yang ditanam, pendapatan dari sistem pengelolaan lahan yang dimiliki dan lainnya. Dalam setiap rumah tangga, suami dan istri diwawancara secara bersama-sama untuk memperoleh data yang lebih akurat.

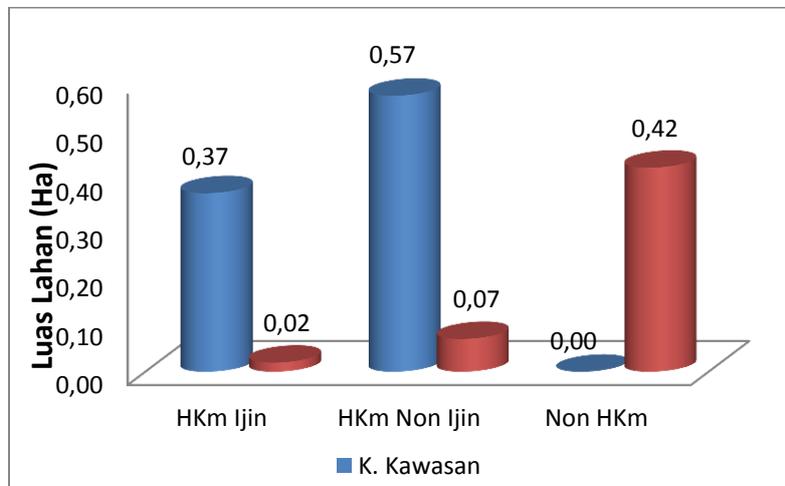


Gambar 1. Lokasi Penelitian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

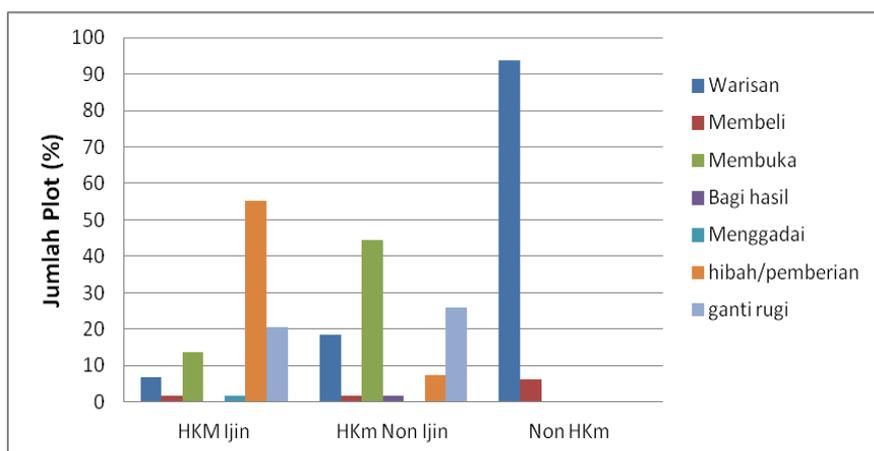
A. Distribusi Kepemilikan Lahan

Rata-rata kepemilikan lahan rumah tangga petani non HKm adalah 0,42 ha, sementara petani HKm ijin adalah 0,39 ha dan petani HKm non ijin adalah 0,64 ha (gambar 2). Perbedaan luas kepemilikan lahan ini disebabkan karena cara memiliki/menguasai lahan yang berbeda-beda pada masing-masing tipologi (gambar 3).



Gambar 2. Distribusi Luas Penguasaan Lahan Rumah tangga Petani

Dari gambar 3 terlihat bahwa terdapat perbedaan cara penguasaan lahan. Petani HKm ijin, sebagian besar (55%) cara penguasaan lahan berasal dari pembagian dari Pemerintah melalui dinas Kehutanan Lombok Barat dan kelompok. Sedangkan petani HKm non ijin sebagian besar (44%) dari membuka langsung dari bekas hutan yang sudah menjadi belukar/hutan sekunder. Sebaliknya, petani Non HKm hampir semua responden (94%) cara memiliki lahan milik adalah dari warisan orang tua.



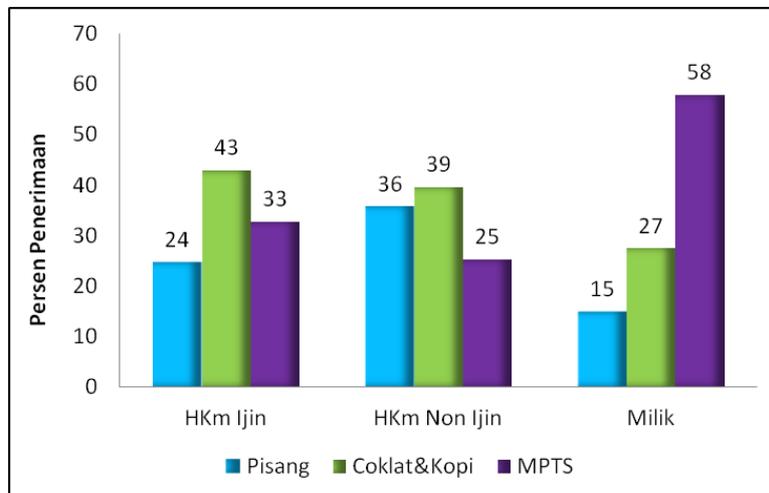
Gambar 3. Grafik cara memiliki/menguasai Lahan

B. Sumbangan Agroforestri terhadap penerimaan/pendapatan petani

Gambar 4 menunjukkan proporsi penerimaan rumah tangga dari kebun campuran. Pada rumah tangga petani HKm ijin, proporsi penerimaan terbesar berasal dari tanaman coklat dan kopi, yaitu sebesar 43%. Demikian pula pada rumah tangga petani HKm non ijin, proporsi penerimaan terbesar berasal dari hasil tanaman coklat dan kopi, yaitu sebesar 39%. Sebaliknya bagi rumah

tangga petani non HKm, proporsi penerimaan terbesar berasal dari hasil tanaman MPTs (*Multi Purpose Tree Species*) seperti tanaman buah-buahan dan kemiri, yaitu sebesar 58%.

Hasil MPTs ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penerimaan rumah tangga petani non HKm karena tanaman buah-buahan di kebun milik pada umumnya sudah menghasilkan. Baik pada petani HKm ijin, petani HKm non ijin dan petani non HKm, tidak ada hasil dari kayu, walaupun sebenarnya di kebun milik (lahan pribadi) terdapat pohon kayu, akan tetapi dalam periode satu tahun terakhir tidak ada pohon kayu yang ditebang untuk dijual ataupun dipakai untuk keperluan sendiri. Sedangkan di lahan kawasan, pohon kayu tidak boleh ditebang.



Gambar 4. Persentase Penerimaan rumah tangga dari Agroforestri (Kebun campuran)

Apabila dilihat dari jenis tanaman yang ada di kebun campuran (agroforestri kompleks), maka kelihatan bahwa berbagai macam tanaman ditanam pada satu plot kebun (tabel 1). Hal ini karena menurut pendapat petani, secara ekonomi pola agroforestri kompleks, yang berbasis pohon buah-buahan atau kayu-kayuan memberikan manfaat lebih tinggi bila dibandingkan dengan pola monokultur tanaman semusim. Berdasarkan pada pemanfaatan lahan, terlihat jelas bahwa petani cenderung memanfaatkan lahannya yang relatif sempit untuk diversifikasi tanaman. Pola diversifikasi penggunaan lahan pada petani yang memiliki lahan sempit dilakukan dengan mengkombinasikan antara tanaman semusim sebagai strategi penyediaan pangan rumah tangga dengan tanaman berbasis pohon yaitu kakao, kopi, buah-buahan dan kayu-kayuan sebagai strategi untuk menghasilkan pendapatan.

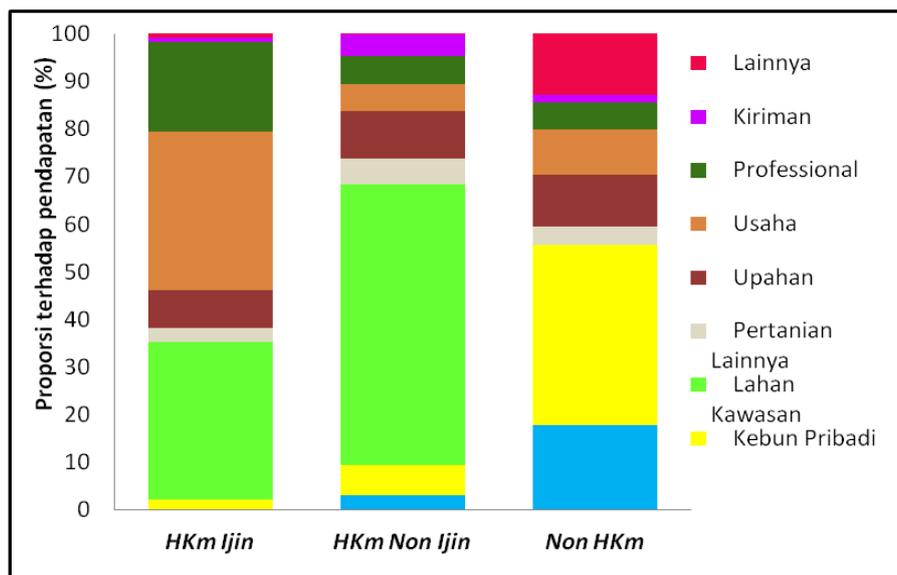
Tabel 1. Jenis tanaman yang ada di kebun campuran (agroforestri) di Sesaot Lombok

Tanaman Pangan	Tanaman Tahunan	Tanaman Buah-buahan	Tanaman Kayu
1. Keladi	1. Coklat	1. Rambutan	1. Mahoni
2. Renggak	2. Kopi	2. Durian	2. Bujur
3. Kacang Tanah		3. Kemiri	3. Sengon
4. Cabai		4. Manggis	4. Dadap
5. Sirih		5. Sirsak	5. Sonokeling
		6. Mangga	6. Gaharu
		7. Nangka	7. Akasia
		8. Sawo	8. Jati
		9. Alpukat	9. Lainnya
		10. Pisang	
		11. Lainnya	

Secara umum, petani berlahan sempit cenderung memilih berinvestasi dengan resiko rendah, yaitu menerapkan pola agroforestri kompleks. Pola agroforestri ini layak sebagai strategi bagi petani yang hanya menguasai lahan rata-rata kurang dari 1 hektar per rumah tangga, karena apabila salah satu jenis tanaman mengalami gagal panen, masih ada harapan pada jenis tanaman lainnya. Diversifikasi pola agroforestri pada lahan sempit yang dimiliki petani, mulai pola agroforestri sederhana berbasis kakao atau kopi hingga agroforestri kompleks berbasis pohon buah-buahan bercampur kayu dapat meningkatkan pendapatan, meminimalkan resiko fluktuasi harga komoditas, mengurangi resiko kegagalan panen, pengendalian hama dan penyakit serta menghindari pengaruh negatif dari iklim.

C. Pendapatan

Pendapatan rumah tangga petani dapat mencerminkan keadaan ekonomi rumah tangganya. Tinggi rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga dapat digunakan sebagai salah satu indikator tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Pada umumnya pendapatan masyarakat di Sesaot berasal dari pengelolaan lahan pertanian di lahan negara yang berupa kebun campuran (agroforestri), lahan pertanian milik sendiri berupa sawah dan kebun, usaha (warung), profesional (guru), upahan dan lainnya.

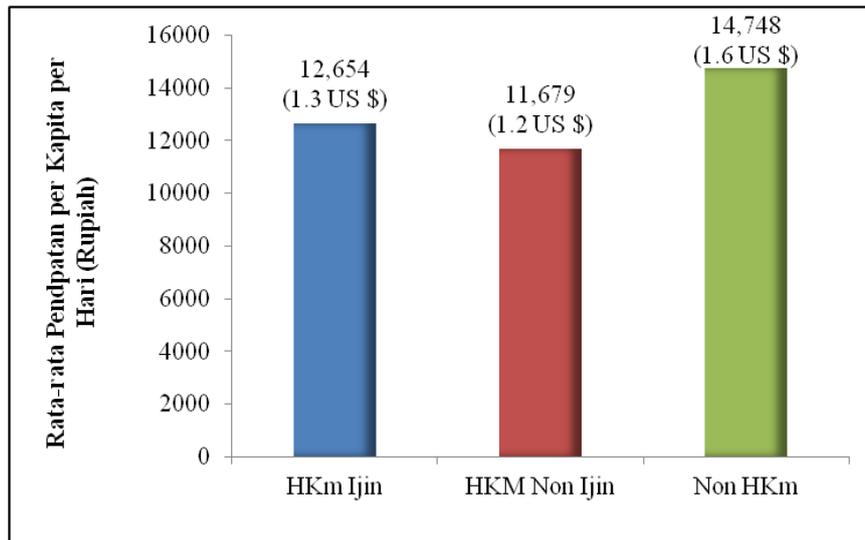


Gambar 4. Pendapatan masyarakat Sesaot berdasarkan sumber pendapatan

Tingginya tingkat proporsi pendapatan dari lahan kawasan ini membuktikan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar hutan Sesaot sangat membutuhkan lahan kawasan sebagai sumber utama mata pencaharian mereka, khususnya bagi petani HKm non ijin.

Pendapatan dari sektor pertanian yang berupa kebun campuran (agroforestri) pada lahan kawasan berperan dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini terlihat dari besarnya proporsi pendapatan petani HKm ijin dan petani HKm non ijin dari lahan kawasan. Proporsi pendapatan petani HKm ijin dari lahan kawasan yang berupa kebun campuran (agroforestri), mencapai 33% dari total pendapatan. Begitu juga petani HKm non ijin, proporsi pendapatan yang berasal dari lahan kawasan, yang berupa kebun campuran (agroforestri) mencapai 59%. Sedangkan pada petani non HKm, proporsi pendapatan yang terbesar berasal dari kebun campuran (agroforestri) pada lahan pribadi/milik yaitu sebesar 38%.

Tingginya tingkat proporsi pendapatan dari lahan kawasan yang berupa kebun campuran (agroforestri) ini membuktikan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar hutan Sesaot sangat membutuhkan lahan kawasan sebagai sumber utama mata pencaharian mereka, khususnya bagi petani HKm non ijin.



Gambar 5. Rata-rata pendapatan per kapita per hari masyarakat Sesaot

Rata-rata pendapatan per kapita per hari petani HKm ijin adalah sebesar Rp. 12.654 (1.3 US \$) dan pendapatan per kapita per hari petani HKm non ijin sebesar Rp. 11.679 (1.2 US \$). Jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita per hari petani non HKm yang mencapai Rp. 14.748 (1.6 US \$), maka dapat dikatakan bahwa petani HKm baik HKm ijin maupun non ijin, kurang sejahtera dibandingkan petani non HKm. Dengan menggunakan standar garis kemiskinan internasional tahun 2008 yaitu sebesar 1.25 US \$ per kapita per hari (World Bank), maka dapat dikatakan bahwa petani non HKm termasuk masyarakat yang sejahtera karena pendapatan per kapita per harinya diatas 1.25 US \$. Sedangkan petani HKm ijin dan petani HKm non ijin pendapatan per kapita per harinya berada di sekitar garis kemiskinan.

Perbedaan rata-rata pendapatan per kapita antara petani HKm ijin, petani HKm non ijin serta petani non HKm tidak terlalu besar. Namun demikian, petani HKm non ijin telah merasakan adanya peningkatan pendapatan dan mereka berharap pendapatan tersebut akan lebih meningkat dengan adanya pemberian ijin HKm dari pemerintah.

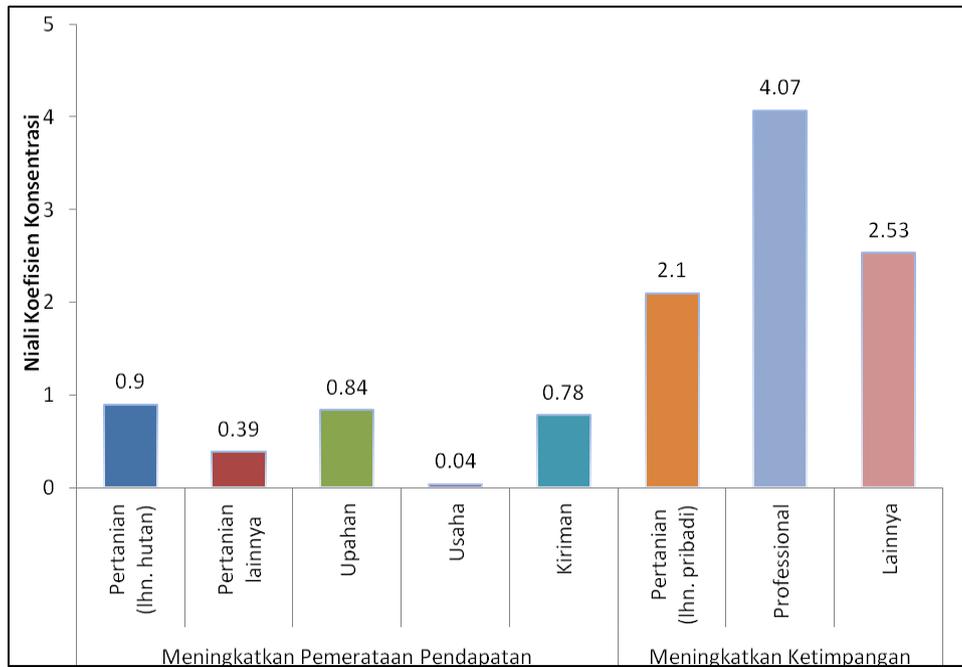
D. Pemerataan Pendapatan

Distribusi pendapatan petani di Sesaot secara umum relatif merata. Hal ini terlihat dari nilai gini rasio yang berkisar 0,26 – 0,38.

Untuk mengukur apakah suatu sumber pendapatan tertentu dapat meningkatkan pemerataan atau meningkatkan ketimpangan pendapatan, dapat diukur dengan koefisien konsentrasi. Sumber pendapatan tertentu berperan dalam meningkatkan pemerataan pendapatan bila nilai koefisien konsentrasi kurang dari satu. Sebaliknya bila nilai koefisien konsentrasi lebih besar dari satu, maka sumber pendapatan itu berperan dalam meningkatkan ketimpangan pendapatan (Alderman and Garcia, 1993) dikembangkan oleh Fei, Ranis, and Kuo (1978) and Pyatt, Chen, and Fei (1980).

Pendapatan dari kebun campuran (agroforestri) di lahan kawasan yang dikelola masyarakat terbukti mengurangi ketimpangan atau meningkatkan pemerataan pendapatan, baik bagi petani HKm ijin maupun petani HKm non ijin, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien konsentrasi 0.9 (kurang dari satu). Ini juga membuktikan bahwa lahan negara merupakan sumber kepemilikan lahan yang sangat penting bagi petani di sekitar hutan, karena pada umumnya lahan negara dapat dikelola petani tanpa harus memiliki modal untuk membeli, melainkan ada pembagian lahan kelola dari pemerintah dan juga sebagian masyarakat membuka dari belukar atau hutan sekunder.

Sebaliknya pendapatan dari pertanian di lahan pribadi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Sebagian besar lahan pribadi diperluas melalui pembelian dan warisan, sehingga hanya orang kaya yang mampu membeli atau mewariskan ke anaknya.



Gambar 5. Sumber pendapatan yang mempengaruhi tingkat Pemerataan dan Ketimpangan pendapatan di Sesaot.

IV. KESIMPULAN

1. Rata-rata kepemilikan lahan rumah tangga petani HKm non ijin (0.64ha) adalah paling tinggi dibandingkan dengan petani non HKm (0.42ha) dan petani HKm ijin (0.39ha).
2. Diversitas tanaman pada lahan HKm dengan sistem Agroforestri dapat memberikan kontribusi dalam kecukupan pangan
3. Pendapatan per kapita per hari petani non HKm (1.6 US \$) paling tinggi dibandingkan dengan petani HKm ijin (1.3 US \$) dan petani HKm non ijin (1.2 US \$).
4. Pendapatan dari kebun campuran (agroforestri) pada lahan negara (lahan kawasan) memberikan proporsi pendapatan yang cukup tinggi, berkisar antara 33%-59%.
5. Pendapatan dari kebun campuran (agroforestri) berperan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan Pemerataan Pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alderman, H, and M.Garcia (1993): Poverty, household food security and nutrition in rural Pakistan. Research Report 96. Washington, D.C. : International Food Policy Research Institute.
- Fei, J.C.H, G. Ranis and S.W.Y.Kuo (1978): Growth and family distribution of income by factor component. Quarterly Journal of Economics 92:17-53.
- Khususiyah N, Rahayu S, Asmawan T and Suyanto S. 2012. Carbon and Watershed Function as Conditionality for Community Forestry (Case study in Sesaot Lombok). The First International Conference of Indonesian Forestry Researchers (INAFOR). Bogor, 5 – 7 December 2011. Bogor, Indonesia. Ministry of Forestry-Forestry Research and Development Agency.
- Khususiyah, N, Janudianto, Isnurdiyansyah, Suyanto and Roshetko JM. 2012. Livelihood strategies and land use system dynamics in South Sulawesi. ICRAF Working Paper (Agroforestry and Forestry in Sulawesi series). 155: 47.

Khususiyah, N, Rahayu,S and Suyanto. 2014. Agroforestry: sistem penggunaan lahan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Seminar Nasional Agroforestri 2013.

Pyatt, G., C. Chen, and John Fei. (1980). *The distribution of income by factor components*. *Quarterly Journal of Economics* 95 (3): 451-173.

Van Noordwijk, M., F. Chandler, and T. P. Tomich. 2004. *An introduction to the conceptual basis of RUPES: rewarding upland poor for the environmental services they provide*. International Centre for Research in Agroforestry Southeast Asia, Bogor, Indonesia.